

Implementasi Kebijakan Pembangunan Kampung di Kawasan Adat: Studi Kasus Peran Pemerintah Kampung di Merauke

Martinus Wika

Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

*Email Korespondensi: martinuswika202@gmail.com

Diterima: 03-12-2025 | Disetujui: 13-12-2025 | Diterbitkan: 15-12-2025

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of village development policies in customary areas and analyze the role of village governments in managing development amidst the influence of customary norms and structures. In addition, this study identifies obstacles and opportunities for integrating government policies with customary governance and formulates recommendations for strengthening village development governance in customary areas. The study uses a qualitative approach with a case study method in several villages in the Marind customary area, Merauke Regency, which were purposively selected based on the strength of customary structures, the amount of Village Fund revenue, and the dynamics of collaboration between village governments and customary institutions. Data were obtained through in-depth interviews with village heads, village officials, customary leaders, community members, and local government representatives, as well as through field observations and documentation studies. The analysis was conducted qualitatively and descriptively with data reduction, presentation, and verification, reinforced by a theoretical framework of policy implementation. The results show that the implementation of village development policies is adaptive, adjusted to customary norms and structures. The village head acts as a facilitator and liaison, while customary values and support from customary leaders provide strategic opportunities. The main obstacles include overlapping authority, limited apparatus capacity, and geographical factors. This research emphasizes the importance of integrating formal governance and local wisdom to build a participatory, adaptive, and sustainable village governance model.

Keywords: *Policy Implementation; Village Development; Customary Areas; Role of Local Government; Participatory Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat serta menganalisis peran pemerintah kampung dalam mengelola pembangunan di tengah pengaruh norma dan struktur adat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan dan peluang integrasi kebijakan pemerintah dengan tata kelola adat serta merumuskan rekomendasi penguatan governance pembangunan kampung di wilayah adat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa kampung di kawasan adat Marind, Kabupaten Merauke, yang dipilih secara purposive berdasarkan kekuatan struktur adat, besarnya penerimaan Dana Desa, dan dinamika kolaborasi antara pemerintah kampung dan lembaga adat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala kampung, aparat kampung, tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah, serta melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan reduksi, penyajian, dan verifikasi data, diperkuat dengan kerangka teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kampung berjalan adaptif, disesuaikan dengan norma dan struktur adat. Kepala kampung berperan sebagai fasilitator dan penghubung, sedangkan nilai-

nilai adat dan dukungan tokoh adat menjadi peluang strategis. Hambatan utama meliputi tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas aparatur, dan faktor geografis. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi governance formal dan kearifan lokal untuk membangun model tata kelola kampung yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Katakunci: Implementasi Kebijakan; Pembangunan Kampung; Kawasan Adat; Peran Pemerintah Lokal; Governance Partisipatif

Bagaimana Cara Sitosi Artikel ini:

Wika, M. (2025). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kampung di Kawasan Adat: Studi Kasus Peran Pemerintah Kampung di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1909-1920.
<https://doi.org/10.63822/txchp67>

PENDAHULUAN

Desa atau kampung merupakan unit pemerintahan terdepan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan lokal(Rusdi et al., 2025). Sebagai level pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, kampung memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kapasitas masyarakat(Fonataba et al., 2024)(Kabuam et al., 2025). Perannya menjadi semakin krusial di wilayah terpencil dan perbatasan, tempat akses terhadap layanan publik masih terbatas. Di kawasan adat, peran kampung tidak hanya administratif, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan nilai, norma, dan struktur sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan implementasi kebijakan di tingkat kampung lebih kompleks karena harus menyesuaikan dengan karakter sosial-budaya lokal. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pembangunan kampung mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa yang menekankan aspek pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat. Melalui instrumen Dana Desa dan berbagai regulasi turunannya, pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih besar bagi kampung untuk merencanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan melalui penguatan tata kelola, pengembangan potensi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik(Suhardi & Panjaitan, 2025). Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat lokal, termasuk kapasitas aparatur, dukungan kelembagaan, serta sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Kabupaten Merauke menjadi contoh menarik dalam konteks ini karena sebagian besar kampungnya berada di kawasan adat Marind yang memiliki karakteristik sosial-kultural yang khas. Sistem kepemimpinan adat, pembagian peran sosial, dan aturan tidak tertulis yang dijalankan secara turun-temurun membentuk pola interaksi khusus antara pemerintah kampung dan masyarakat adat. Struktur kelembagaan adat yang kuat dapat menjadi potensi sekaligus tantangan dalam implementasi kebijakan pembangunan. Di satu sisi, nilai-nilai adat dapat memperkuat kohesi sosial dan mendorong partisipasi. Namun di sisi lain, apabila tidak dikelola dengan baik, dinamika internal antara lembaga adat dan pemerintahan kampung dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat pengambilan keputusan. Selain faktor sosial-budaya, kondisi geografis Merauke yang luas, jarak antar-kampung yang berjauhan, serta keterbatasan infrastruktur turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pembangunan kampung. Kapasitas birokrasi lokal yang masih berkembang, rendahnya kompetensi teknis sebagian aparatur kampung, serta keterbatasan akses informasi dan teknologi menjadi hambatan tersendiri. Relasi antara pemerintah kampung dan lembaga adat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program, terutama ketika terjadi ketidaksinkronan dalam perencanaan, penganggaran, atau pelaksanaan kegiatan pembangunan(Hajar, 2025). Kompleksitas ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat seperti Merauke memerlukan pendekatan yang adaptif, sensitif budaya, dan mampu mengintegrasikan tata kelola formal dengan nilai-nilai lokal.

Meskipun kebijakan pembangunan kampung telah diimplementasikan hampir satu dekade, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya di kawasan adat masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan, tumpang tindih kewenangan antara struktur adat dan pemerintahan kampung, serta lemahnya tata kelola dana kampung menjadi fenomena yang berulang di banyak wilayah, termasuk

Merauke. Kondisi tersebut diperparah oleh kurang optimalnya kolaborasi antara pemerintah kampung dan lembaga adat sehingga pembangunan yang direncanakan sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Tantangan ini menegaskan pentingnya kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan benar-benar berlangsung di tingkat kampung, khususnya dalam konteks masyarakat adat.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah praktik implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat, terutama di wilayah Papua Selatan yang memiliki karakteristik sosial-budaya dan historis yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Keunikan struktur adat, pola kepemimpinan tradisional, serta mekanisme musyawarah yang khas menjadikan implementasi kebijakan tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan birokratis formal. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mampu menggambarkan dinamika nyata di lapangan dan menjelaskan bagaimana interaksi antara pemerintah kampung dan masyarakat adat memengaruhi proses pembangunan. Studi kasus di Kabupaten Merauke sangat relevan karena wilayah ini memiliki lanskap adat yang luas dan merupakan salah satu penerima Dana Desa terbesar di Papua Selatan. Hal ini menjadikan Merauke sebagai laboratorium sosial yang penting untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan kampung bekerja dalam konteks masyarakat adat. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di Merauke berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain di Papua Selatan yang memiliki kondisi serupa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi strategis baik untuk penguatan praktik tata kelola lokal maupun bagi pengembangan ilmu pemerintahan yang berfokus pada governance berbasis adat.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek tata kelola dana desa, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pemerintah desa, tetapi masih jarang yang mengeksplorasi secara mendalam interaksi antara pemerintah kampung dan sistem adat dalam implementasi pembangunan. Padahal, di wilayah seperti Merauke, relasi antara struktur pemerintahan formal dan lembaga adat merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas kebijakan. Minimnya kajian yang menguraikan secara komprehensif peran kepala kampung, aparat kampung, dan tokoh adat dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan menyebabkan pemahaman tentang dinamika implementasi kebijakan di kawasan adat masih terbatas. Selain itu, belum ada penelitian yang secara sistematis menjelaskan bagaimana nilai, norma, dan mekanisme adat berpengaruh terhadap hasil pembangunan kampung, baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun efektivitas program. Literatur yang ada umumnya hanya menyentuh aspek adat secara deskriptif tanpa menelusuri bagaimana praktik budaya tersebut berinteraksi dengan sistem pemerintahan formal. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam integrasi antara tata kelola kampung dan tata kelola adat, sehingga memberikan kontribusi baru bagi pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks masyarakat adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat serta menganalisis peran pemerintah kampung dalam mengelola pembangunan di tengah pengaruh norma dan struktur adat yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dan peluang integrasi kebijakan pemerintah dengan tata kelola adat serta merumuskan rekomendasi penguatan governance pembangunan kampung di wilayah adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara komprehensif dinamika sosial, interaksi antara pemerintah kampung dan lembaga adat, serta konteks kelembagaan yang memengaruhi proses pembangunan secara nyata dan spesifik. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa kampung yang berada dalam kawasan adat Marind di Kabupaten Merauke, dengan pemilihan lokasi dilakukan secara purposive untuk memastikan kesesuaian konteks dengan fokus penelitian. Kampung-kampung tersebut dipilih berdasarkan kuatnya struktur adat yang masih dijalankan, besarnya penerimaan Dana Desa yang berperan dalam pembangunan lokal, serta tingginya dinamika kolaborasi antara pemerintah kampung dan lembaga adat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Pemilihan lokasi ini memungkinkan peneliti mengamati secara langsung bagaimana kebijakan pembangunan kampung diimplementasikan dalam lingkungan sosial-budaya yang khas dan berlandaskan nilai-nilai adat.

Subjek dan informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi peran mereka dalam implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat. Informan utama terdiri dari 2 kepala kampung dan 4 aparatur kampung yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Penelitian juga melibatkan 3 ketua atau tokoh lembaga adat serta 4 tokoh masyarakat/adat Marind untuk memahami dinamika sosial-budaya yang memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat lokal. Selain itu, 2 pendamping desa dipilih untuk memberikan perspektif teknis terkait tata kelola pembangunan kampung. Dari sisi pemerintah daerah, 2 perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Merauke diwawancara untuk menjelaskan kebijakan dan mekanisme pendampingannya. Untuk melengkapi informasi terkait dampak dan penerimaan program, penelitian juga melibatkan 10 masyarakat penerima manfaat sehingga analisis dapat menggambarkan implementasi kebijakan secara komprehensif dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali secara komprehensif peran, persepsi, serta pengalaman para informan terkait implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki fleksibilitas mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama proses interaksi dengan informan, termasuk dinamika relasi antara pemerintah kampung, lembaga adat, dan masyarakat. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi detail mengenai hambatan, peluang, serta praktik kolaborasi yang terjadi dalam konteks sosial-budaya masyarakat Marind. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kampung, termasuk interaksi antara aparatur kampung dan tokoh adat dalam forum-forum pengambilan keputusan. Observasi dilengkapi dengan studi dokumentasi untuk memperoleh data tertulis yang relevan seperti RPJM Kampung, RKP Kampung, APBKampung, laporan kegiatan, peta sosial kampung, serta dokumen-dokumen kelembagaan adat. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan triangulasi data sehingga interpretasi peneliti lebih akurat, valid, dan mampu menggambarkan konteks implementasi kebijakan secara utuh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat. Proses analisis diawali dengan reduksi data, yaitu pengelompokan, penyaringan, dan pemfokusan informasi yang

diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan tema-tema utama, seperti bentuk implementasi kebijakan, peran pemerintah kampung, interaksi dengan lembaga adat, serta hambatan dan peluang dalam pelaksanaan program. Reduksi data ini membantu menyaringkan informasi yang kurang relevan dan memudahkan fokus analisis pada isu-isu inti penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks yang menggambarkan hubungan antara pemerintah kampung dan lembaga adat. Penyajian ini mempermudah pemahaman pola, dinamika, dan interaksi yang terjadi di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan keakuratan interpretasi. Analisis diperkuat dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan, seperti pendekatan Edwards III dan Grindle, yang membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dan hubungan antara kebijakan formal pemerintah dengan praktik lokal di tingkat kampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas temuan penelitian secara rinci, perlu digambarkan konteks implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat Merauke. Penelitian ini menekankan peran pemerintah kampung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan sambil menyesuaikan dengan norma dan struktur adat yang berlaku. Analisis difokuskan pada bagaimana kebijakan formal pemerintah dapat diintegrasikan dengan tata kelola adat, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta peluang untuk meningkatkan efektivitas dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika implementasi kebijakan pembangunan kampung di wilayah adat serta memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan governance lokal.

Tabel 1. Implementasi Program Pembangunan Kampung di Kawasan Adat Merauke

Program Pembangunan	Sasaran/Kegiatan Utama	Status Implementasi	Catatan Integrasi dengan Adat
Infrastruktur	Pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih	80% selesai	Perencanaan disesuaikan dengan wilayah adat, lokasi jalan menyesuaikan tanah adat dan pemakaman tradisional
Kesehatan	Posyandu, klinik desa, penyuluhan kesehatan	70% selesai	Beberapa kegiatan disesuaikan dengan tradisi pengobatan adat
Pendidikan	Renovasi sekolah, fasilitas belajar, pelatihan guru	60% selesai	Materi pembelajaran dimodifikasi agar tidak bertentangan dengan nilai adat
Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Pelatihan UMKM, bantuan modal, kelompok tani	50% selesai	Program diselaraskan dengan sistem kepemilikan tanah dan praktik adat lokal
Administrasi & Tata Kelola	Musrenbang Kampung, penyusunan RPJM, APBKampung	90% selesai	Dokumen perencanaan mencantumkan musyawarah adat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan

Tabel 1 menunjukkan implementasi berbagai program pembangunan kampung di kawasan adat Merauke, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga administrasi dan tata kelola. Hasil menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian program bervariasi, dengan

administrasi dan tata kelola paling tinggi (90%) dan pemberdayaan ekonomi lokal relatif rendah (50%). Integrasi dengan nilai dan aturan adat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan, misalnya penyesuaian lokasi pembangunan, adaptasi materi pendidikan, dan penyelarasan program ekonomi dengan kepemilikan tanah adat. Beberapa kegiatan tertunda karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah kampung dan lembaga adat, menunjukkan perlunya strategi kolaboratif yang lebih kuat.

Tabel 3. Peran Pemerintah Kampung dan Strategi Implementasi Pembangunan di Kawasan Adat Merauke

Aspek Peran	Deskripsi Kegiatan	Strategi Adaptif / Pendekatan	Dampak / Hasil
Kepala Kampung	Menjadi penghubung antara masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah kabupaten	Menyesuaikan prioritas pembangunan dengan norma adat	Meningkatkan legitimasi sosial dan dukungan masyarakat
Aparat Kampung	Memfasilitasi koordinasi, administrasi keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program	Menyusun anggaran fleksibel berdasarkan musyawarah adat	Pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan transparan
Kolaborasi & Komunikasi	Mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat	Mengadakan forum musyawarah gabungan (pemerintah + adat)	Meminimalkan konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat
Strategi Adaptif Pemerintah	Penyesuaian aturan formal dengan adat lokal	Penyesuaian alokasi dana dan jadwal pembangunan sesuai adat	Program pembangunan dapat diterima dan dijalankan efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala kampung berperan sebagai penghubung utama antara masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah kabupaten, sementara aparat kampung memfasilitasi koordinasi, administrasi keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program. Dalam proses ini, pemerintah kampung menerapkan strategi adaptif dengan menyesuaikan aturan formal pemerintah terhadap norma dan struktur adat, misalnya dalam penentuan prioritas pembangunan atau alokasi dana. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif melalui forum musyawarah gabungan terbukti menjadi kunci keberhasilan implementasi, sehingga program pembangunan dapat dijalankan tepat sasaran, diterima oleh masyarakat, dan mendukung legitimasi sosial di kawasan adat Merauke.

Tabel 3 Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Kampung di Kawasan Adat Merauke

Kategori Hambatan	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Implementasi
Kelembagaan dan koordinasi	Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kampung dan lembaga adat	Keterlambatan pengambilan keputusan dan penundaan program
Kapasitas aparatur	Aparat kampung memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi program	Pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan kurang optimal
Partisipasi masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat bervariasi, tergantung keterlibatan tokoh adat dan pemahaman masyarakat	Beberapa program sulit dilaksanakan karena partisipasi rendah
Faktor geografis dan infrastruktur	Jarak antar-kampung jauh, akses transportasi terbatas	Distribusi bantuan dan monitoring program menjadi sulit

Tabel 3 menyajikan temuan penelitian mengenai berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat Merauke. Hambatan tersebut mencakup kelembagaan dan koordinasi, kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, serta faktor geografis dan infrastruktur. Setiap kategori hambatan dijelaskan berdasarkan temuan lapangan dan dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan program, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan kampung di wilayah adat.



Gambar 1. Legitimasi Sosial untuk Pembangunan Kampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan norma adat memiliki peran strategis sebagai sumber legitimasi sosial bagi program pembangunan kampung, terutama apabila disinergikan dengan kebijakan pemerintah. Dukungan dari tokoh adat terbukti mempercepat proses implementasi program sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan(Tambaip et al., 2024). Salah satu strategi integratif yang efektif adalah pemanfaatan forum musyawarah bersama antara pemerintah kampung dan lembaga adat, yang memungkinkan pengambilan keputusan partisipatif dan penyelarasan prioritas pembangunan(Tambaip & Tjilen, 2023b). Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan tata kelola keuangan dan administrasi program menjadi langkah penting untuk memperkuat governance, memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan konteks sosial-budaya setempat.

Implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat Merauke menunjukkan pola yang selektif dan adaptif, di mana program pemerintah disesuaikan dengan norma, tradisi, dan aturan adat yang berlaku(Tambaip et al., 2023b). Pendekatan adaptif ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga legitim secara sosial bagi masyarakat adat Marind. Kepala kampung dan aparatur kampung memainkan peran kunci dalam menafsirkan dan menyesuaikan regulasi pemerintah agar relevan dengan konteks lokal, termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan dan mekanisme partisipasi masyarakat. Beberapa program pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi lokal, berhasil

diimplementasikan karena mendapatkan dukungan aktif dari tokoh adat(Tjilen, Waas, et al., 2023). Dukungan ini menjadi penting karena tokoh adat memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dan penerimaan program. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi sosial melalui kolaborasi dengan struktur adat dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, sejalan dengan prinsip governance berbasis komunitas.

Kendala muncul ketika regulasi formal pemerintah tidak sepenuhnya selaras dengan struktur kelembagaan adat(Riyanto et al., 2024). Tumpang tindih kewenangan, perbedaan prosedur, dan prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan norma adat sering memicu keterlambatan atau bahkan revisi program. Hal ini menegaskan bahwa konflik antara aturan formal dan norma lokal merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pembangunan di kawasan adat(Syahruddin et al., 2023). Pengelolaan konflik ini membutuhkan strategi komunikasi yang baik dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai sosial-budaya lokal. Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980), yang menekankan pentingnya konteks lokal dan faktor sosial-budaya dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan formal, tetapi juga oleh kemampuan aparat lokal untuk menyesuaikan dan menafsirkan kebijakan sesuai kondisi sosial, budaya, dan struktur kelembagaan setempat(Tambaip et al., 2025). Temuan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi penguatan governance pembangunan kampung yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di kawasan adat Merauke.

Kepala kampung di kawasan adat Merauke memegang peran sentral sebagai penghubung dan fasilitator utama antara pemerintah kabupaten, masyarakat lokal, dan lembaga adat(Tjilen, Tambaip, et al., 2023). Peran ini melibatkan koordinasi berbagai kepentingan, penyampaian informasi, dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebijakan formal pemerintah dan norma adat yang berlaku. Kepala kampung berfungsi sebagai mediator yang memastikan program pembangunan dapat diterima oleh masyarakat tanpa mengabaikan prosedur administrasi pemerintah. Aparat kampung lainnya turut menunjukkan strategi adaptif dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya dengan menyesuaikan prioritas proyek sesuai kebutuhan dan nilai-nilai adat setempat(Tambaip & Tjilen, 2023a). Mereka juga memanfaatkan forum adat sebagai mekanisme konsultasi publik, sehingga masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya konsep governance adaptif, di mana aparat pemerintah lokal dituntut untuk mampu menyeimbangkan aturan formal dengan faktor sosial-budaya yang kompleks(Tambaip et al., 2023b). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk memahami konteks lokal, membangun konsensus, dan menyesuaikan kebijakan sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat adat(Tjilen et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal bukan sekadar administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga legitimasi sosial. Peran kepala kampung dan aparat kampung menjadi kunci dalam membangun legitimasi sosial serta meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan kampung. Dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat secara aktif, pemerintah kampung mampu menciptakan program yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas pembangunan, tetapi juga

menegaskan pentingnya integrasi antara governance formal dan kearifan lokal dalam konteks kawasan adat Merauke.

Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kampung dan lembaga adat muncul sebagai hambatan utama dalam implementasi kebijakan pembangunan kampung di Merauke. Konflik kewenangan ini sering terjadi karena adanya perbedaan aturan formal pemerintah dengan norma dan struktur kelembagaan adat yang telah mengakar secara turun-temurun(Tambaip et al., 2023a). Fenomena ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa konflik kewenangan antara institusi formal dan adat dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas implementasi kebijakan di daerah adat. Selain konflik kewenangan, keterbatasan kapasitas aparatur kampung dalam bidang administrasi, pengelolaan keuangan, dan monitoring program menjadi hambatan signifikan. Aparat yang belum memiliki keterampilan teknis yang memadai sulit untuk menyusun perencanaan pembangunan secara tepat, mengelola anggaran, dan melakukan evaluasi program secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan beberapa proyek pembangunan tertunda atau pelaksanaannya kurang optimal, meskipun sudah mendapat dukungan sosial dari masyarakat adat.

Faktor geografis dan infrastruktur yang terbatas juga turut memengaruhi efektivitas implementasi. Jarak antar-kampung yang jauh, akses transportasi yang sulit, dan fasilitas komunikasi yang terbatas menjadi kendala logistik bagi distribusi bantuan, pelaksanaan proyek, dan koordinasi antarstakeholder(Tjilen et al., 2022). Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi, tergantung pada keterlibatan tokoh adat dan pemahaman masyarakat tentang program pembangunan, menambah kompleksitas dalam pelaksanaan kebijakan. Diskusi ini menegaskan perlunya pendekatan strategis yang mengintegrasikan manajemen risiko dan pemberdayaan kapasitas aparatur kampung untuk mengatasi hambatan struktural. Strategi ini meliputi peningkatan kompetensi teknis aparatur, pelatihan tata kelola keuangan, serta mekanisme kolaboratif dengan lembaga adat untuk menyelaraskan kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, implementasi kebijakan dapat lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat legitimasi sosial dan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan kampung.

Nilai dan norma adat di kawasan Marind merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung implementasi program pembangunan kampung. Nilai-nilai adat tidak hanya membentuk perilaku dan interaksi sosial masyarakat, tetapi juga menjadi sumber legitimasi yang mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan program pemerintah(Tambaip & Tjilen, 2023b). Ketika norma adat disinergikan dengan kebijakan pemerintah, hal ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepatuhan pada aturan formal dan kepuasan sosial masyarakat, sehingga program pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi integrasi yang efektif terlihat melalui penggunaan forum musyawarah gabungan, yang mengombinasikan mekanisme Musrenbang kampung dengan forum adat. Pendekatan ini memungkinkan tokoh adat dan masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pembangunan. Selain itu, adaptasi perencanaan pembangunan sesuai konteks lokal, seperti menyesuaikan prioritas proyek dengan kebutuhan masyarakat adat, menjadi salah satu praktik kunci untuk meningkatkan relevansi dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Pendekatan ini sejalan dengan teori policy implementation framework, yang menekankan bahwa interaksi antar-stakeholder, kolaborasi antar-institusi, dan legitimasi sosial merupakan faktor penentu keberhasilan kebijakan publik. Keberhasilan implementasi program pembangunan kampung di Merauke menunjukkan bahwa integrasi formalitas pemerintahan dengan nilai sosial-budaya lokal dapat memperkuat

efektivitas kebijakan dan meminimalkan konflik antar-lembaga. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam desain dan pelaksanaan kebijakan publik. Peluang yang muncul dari integrasi ini dapat dimanfaatkan untuk membangun model governance lokal yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Model semacam ini tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah kampung dalam menyelenggarakan pembangunan, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dan tokoh adat secara aktif. Dengan demikian, strategi integrasi antara pemerintah kampung dan lembaga adat dapat menjadi dasar pengembangan tata kelola yang efektif dan inklusif di kawasan adat Merauke, sekaligus menjadi referensi praktik governance adaptif di wilayah lain dengan karakter serupa.

Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan di kawasan adat sangat bergantung pada integrasi antara pendekatan formal pemerintah dan kearifan lokal, di mana norma, nilai, dan struktur kelembagaan adat menjadi determinan utama efektivitas pelaksanaan program. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan dasar rekomendasi untuk penguatan kapasitas pemerintah kampung, pengembangan forum partisipatif yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat, serta strategi adaptasi kebijakan yang sensitif terhadap konteks lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan legitimasi sosial pembangunan kampung, sehingga program-program pembangunan lebih diterima dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat adat di Merauke.

KESIMPULAN

Hasil penelitian studi kasus di kawasan adat Marind, Kabupaten Merauke, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kampung berjalan secara adaptif, menyesuaikan program pemerintah dengan norma dan struktur adat setempat. Kepala kampung dan aparat kampung berperan penting sebagai fasilitator dan penghubung, menyeraskan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat, sehingga tercipta legitimasi sosial dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan utama, yakni tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kampung dan lembaga adat, keterbatasan kapasitas aparatur, faktor geografis, serta variasi tingkat partisipasi masyarakat. Di sisi lain, nilai-nilai adat dan dukungan tokoh adat menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan melalui forum musyawarah gabungan dan adaptasi program pembangunan sesuai konteks lokal. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi governance formal dan kearifan lokal dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan kampung. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi pemerintah kampung dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan model tata kelola pembangunan kampung yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan di kawasan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Fonataba, Y., Hombore, E., Nathan, I. A., & Konorop, S. Y. (2024). Penguatan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Kinerja Masyarakat di Lingkungan Kampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(2), 76–86.

Hajar, S. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS SOUND GOVERNANCE DI KAWASAN DANAU TOBA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 318–333.

Kabuam, W., Kebubun, R. J. M., & Hombore, E. (2025). Pengaruh Manajemen Pemerintahan Kampung: Strategi Tata Kelola Dan Pelayanan Publik Di Kampung Kelapa Lima Merauke. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1461–1470.

Riyanto, P., Humaid, H., Tambaip, B., Asmawi, M., & Lubis, J. (2024). Education and Welfare: The Role of Public Policy in Equalizing Educational Opportunities for the South Papua Generation. *KnE Social Sciences*, 574–588.

Rusdi, R., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2025). Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(2).

Suhardi, S., & Panjaitan, P. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 42–55.

Syahruddin, S., Tambaip, B., Tjilen, A. P., Riyanto, P., Jalal, N., Moento, P. A., Prasetya, M. N., & Enala, S. H. (2023). Membangun Karakter Positif dan Kepemimpinan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Merauke. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 95–105.

Tambaip, B., Riyanto, P., Tjilen, A. P., Negara, I. A., & Musamus, U. (2024). Pengaruh Sistem Manajemen SDM untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan di Lingkungan Desa. *I(10)*, 1611–1619.

Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023a). Analisis Kebijakan Publik dalam Derajat Kesehatan di Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 101–110.

Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023b). Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(02), 410–420.

Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023a). Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 97–106.

Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023b). Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 5(1), 1–9.

Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2025). Transformative Leadership in Equitable Public Management: Advancing Educational Access and Quality in South Papua. *Journal of Ecohumanism*, 4(2), 1117–1131.

Tjilen, A. P., Sahetapy, W., Tambaip, B., & Betaubun, M. (2022). Ecotourism development policy, supporting capacity and development of sustainable tourism facilities and infrastructure in Raja Ampat Regency, West Papua Province. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, 4(03).

Tjilen, A. P., Tambaip, B., Dharmawan, B., Adrianus, A., Riyanto, P., & Ohoiwutun, Y. (2024). Engaging stakeholders in policy decision-making for food security governance: Identification, perception, and contribution. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 8(1), 144–154. <https://doi.org/10.22495/cgobrv8i1p12>

Tjilen, A. P., Tambaip, B., Waas, R. F. Y., Moento, P. A., & Purnama, E. N. (2023). Pengaruh Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 257–262.

Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahruddin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.